

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

SEMESTER 1

2023



08112896960



badiklatkumham.jateng@gmail.com



badiklat-jateng.kemenkumham.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023.

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Semester I Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, dan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 dapat menjadi pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023 serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Semarang, 06 Juli 2023
Kepala,

Kaswo
NIP. 19740426 199903 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu “Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah”, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah memperoleh capaian sasaran kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 94,01% dari target 92%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan pula Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 telah memenuhi target output yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi output yang telah tercapai sebesar 8.671 peserta dari target 3.000 peserta.



Total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 14.287.752.000,00. Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023 telah menyerap anggaran senilai total Rp 4.480.461.436,00 atau sebesar 31,36% dari total anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Aspek Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	10
E. Isu Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	10
F. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis (Renstra)	15
B. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran	41
C. Capaian Kinerja Anggaran	45
D. Capaian Kinerja Lainnya	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR GRAFIK

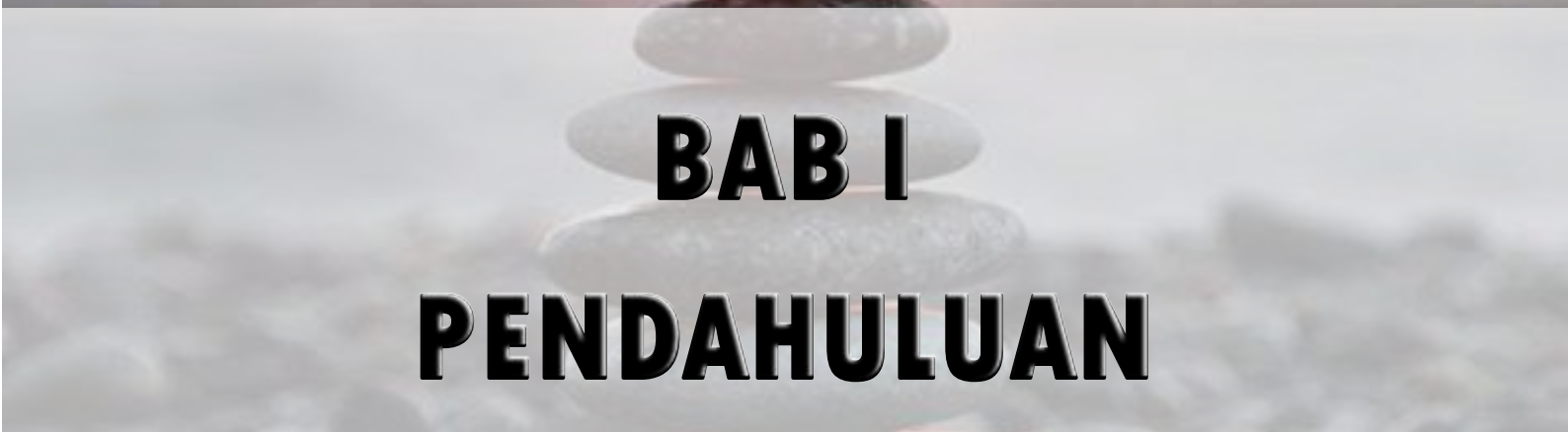
<i>Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....</i>	8
<i>Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....</i>	8
<i>Grafik 3. Nilai SMART DJA.....</i>	45

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM.....</i>	4
<i>Tabel 2. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024.....</i>	18
<i>Tabel 3. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.....</i>	21
<i>Tabel 4. Sasaran Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah 2020-2024.....</i>	21
<i>Tabel 5. Perjanjian Kinerja.....</i>	23
<i>Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja BAdHukum dan HAM Jateng Semester I 2023.....</i>	26
<i>Tabel 7. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Semester I Tahun 2023.....</i>	27
<i>Tabel 8. Capaian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.....</i>	28
<i>Tabel 9. Capaian Output Kinerja.....</i>	29
<i>Tabel 10. Capaian Kinerja Program kegiatan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.....</i>	32
<i>Tabel 11. Perbandingan capaian kinerja Semester I Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.....</i>	36
<i>Tabel 12. Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2023.....</i>	41
<i>Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan.....</i>	42
<i>Tabel 14. Anggaran Pembangunan Lanjutan Sarana Olahraga, Rumah Dinas dan Kolam Retensi.....</i>	44
<i>Tabel 15. Realisasi Per Jenis Belanja.....</i>	45
<i>Tabel 16. Capaian Kinerja Semester I Tahun 2023.....</i>	48

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Struktur Organisasi.....</i>	7
<i>Gambar 2. Nilai IKPA.....</i>	46
<i>Gambar 3. E-Performance.....</i>	47
<i>Gambar 4. e-monev Bappenas.....</i>	49



A. Latar Belakang

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki 10 wilayah kerja yaitu provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja di masa mendatang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.

Tugas dan Fungsi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai **tugas** menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing. Saat ini telah dibentuk tiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM di Indonesia, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pembagian wilayah kerja dari masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM

No	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Batam, Kepulauan Riau	Provinsi : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Bitung, Sulawesi Utara	Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

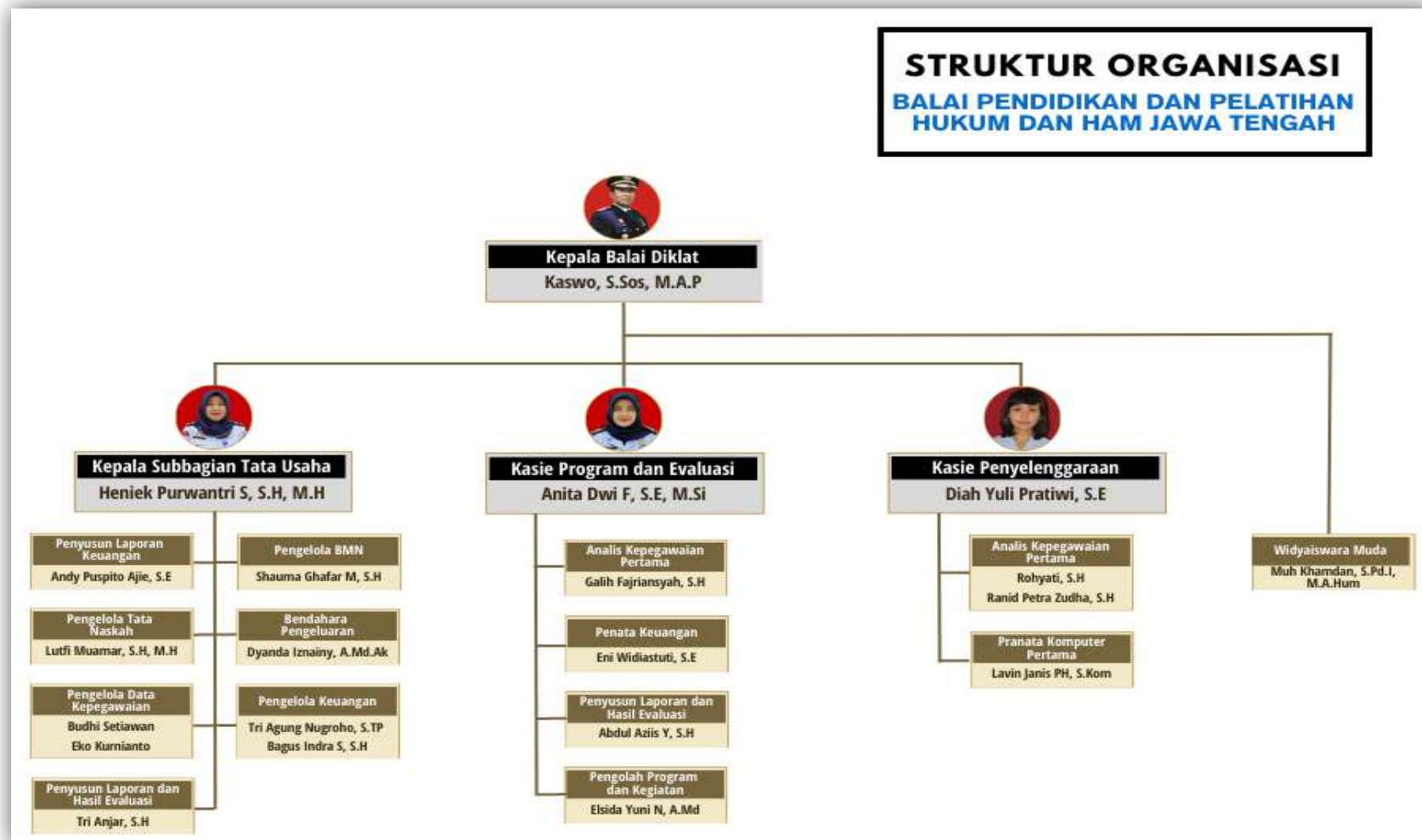
Sementara itu **tujuan** yang ingin dicapai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah:

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada Kementerian Hukum dan HAM di daerah.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Gambar 1. Struktur Organisasi



Sumber Daya Manusia

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Balai Diklat dengan membawahi 3 (tiga) orang Pejabat Pengawas dan didukung oleh para pelaksana.

- 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat;
- 1 (satu) orang Widyaiswara Ahli Madya;
- 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- 2 (dua) orang Kepala Seksi :
 - Kepala Seksi Penyelenggaraan
 - Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1 orang
Eselon IV	3 orang
JFU	12 orang
JFT	5 orang
Jumlah	21 orang

Sebagaimana struktur organisasi di atas, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 21 ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan yang mendukung kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

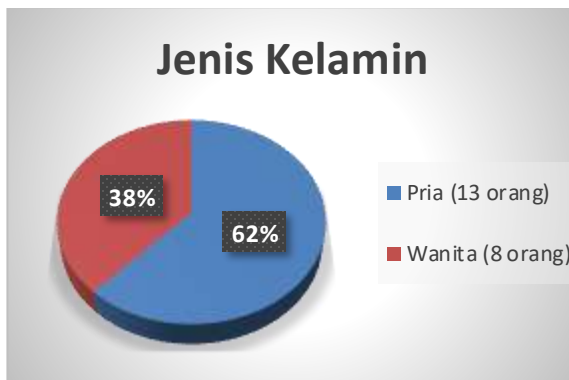
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Seksi Program dan Evaluasi

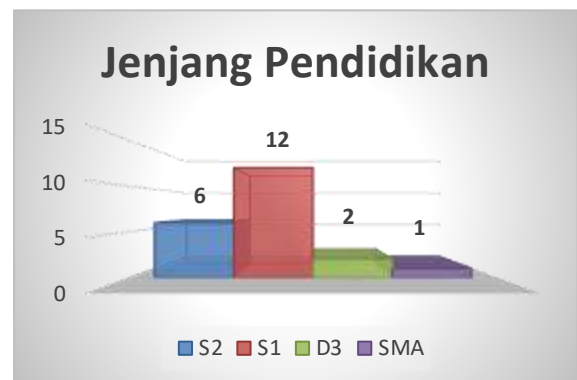
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

3. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja; Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja; Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Pedoman Evaluasi Kinerja; Pedoman Reviu Laporan Kinerja; Pedoman Reviu LKJIP; Kebijakan penerapan SAKIP.

Maksud Penyusunan LKjIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.
2. Mendorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada stakeholder terhadap Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja. Dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.
5. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun yang akan datang.

Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini juga agar visi, misi dan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis. LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan

acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang, serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Aspek Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diatur bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tugas yang diemban tersebut tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kompetensi ASN.

Aspek strategis tersebut sejalan dengan menyesuaikan kerangka regulasi dan kelembagaan yang menetapkan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Pelaksanaan standarisasi sertifikasi, akreditasi dan sistem pengembangan kompetensi SDM di Bidang Hukum dan HAM dalam skema Corporate University;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
- 5) Pelaksanaan administrasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

E. Isu Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi

penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam konteks internal kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri terdapat beberapa isu strategis yang pada akhirnya mendorong teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada sisi sumber daya manusia dan organisasi, belum terpetakannya profil kompetensi yang disandingkan dengan analisis jabatan dan beban kerja telah memicu kendala yang cukup berarti, sehingga mengakibatkan:

- Beban kerja yang belum merata
- Kompetensi pegawai yang belum merata
- Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi

Di samping hal tersebut, terdapat pula beberapa kompetensi yang masih sangat membutuhkan upaya peningkatan lebih lanjut, seperti; Teknologi Informasi, Desain Program Pembelajaran (pengembangan kurikulum dan metoda pembelajaran), Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan, serta kebutuhan yang cukup mendesak pula atas peningkatan etos dan budaya kerja professional. Berbagai hal tersebut pada akhirnya telah memicu pencapaian kinerja organisasi yang belum optimal, serta tidak terlaksananya berbagai program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi dengan metodologi yang mutakhir.

Dalam hal metodologi pembelajaran sendiri, telah dimilikinya program pembelajaran berbasis e-learning, serta ketersediaan instrumen evaluasi pembelajaran dan paska pelatihan (meskipun masih membutuhkan upaya pemutakhiran agar memberikan hasil yang maksimal), telah menjadi suatu kekuatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mendorong peningkatan jumlah pegawai yang mendapatkan program pengembangan kompetensi, serta dapat terukurnya peningkatan kompetensi peserta pelatihan, dan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Namun demikian, dalam hal metodologi ini pula didapatkan indikasi bahwa masih belum terjadi kesesuaian antara metodologi pembelajaran dengan

kebutuhan pegawai Kemenkumham serta alokasi anggaran. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada:

1. kualitas program pengembangan kompetensi pegawai Kemenkumham yang belum maksimal,
2. belum meratanya pengembangan kompetensi pegawai Kemenkumham, berdasarkan UU ASN No 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki inovasi yang digunakan untuk menunjang kinerja diantaranya:

- BLC (*Badiklat Learning Center*) yang merupakan portal pembelajaran mandiri milik Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- SILABA (Sistem Informasi Pelatihan Balai Diklat Jateng) merupakan sebuah framework yang dibangun untuk memudahkan Satuan Kerja di wilayah kerja dalam menyampaikan kebutuhan pelatihan bagi para pegawai;
- ITU (Informasi Tata Usaha) merupakan aplikasi informasi tata usaha meliputi keuangan dan BMN, Kepegawaian, dan Umum;
- JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKjIP, tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis, serta Sistematika Laporan;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program

kerja, serta informasi mengenai anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2023;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023 mencakup :

- a. Capaian Kinerja Organisasi, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- b. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- c. Capaian Kinerja Anggaran, menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu kinerja Aplikasi SMART DJA dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- d. Capaian Kinerja lainnya, diuraikan capaian kinerja melalui aplikasi E-performance, Target Kinerja, dan e-Monev Bappenas.

Bab IV – Penutup, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Semester I Tahun 2023 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Saran.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Tahun 2020-2024 diharapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin baik serta profesional, aparatur negara di pusat dan daerah semakin mampu mendukung pembangunan nasional seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017.

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai **visi** yaitu :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Makna dari visi ini adalah Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan **misi** sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional.
- ❖ Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- ❖ Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- ❖ Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tata nilai yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan menjunjung nilai **PASTI** :

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain itu Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki nilai-nilai dasar (Core Value) ASN "**BerAKHLAK**" dan Employer Branding. Core Values ASN ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (core values) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core values BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Kemenkumham menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024

(Sumber: Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024)

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Pemangku Kepentingan	Sasaran Strategis 1 (SS1): Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2): Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
Bisnis Proses Internal	Sasaran Strategis 3 (SS3): Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4): Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
		2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas
		3. Persentase mantan narapidana yang terampil dan bersertifikat
		4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		
Sasaran Strategis 5 (SS5):	1. Persentase menurunnya residivis	

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	2. Persentase penegakkan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6): Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	1. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pembelajaran dan Pertumbuhan	Sasaran Strategis 7 (SS7): Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8): Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Korupsi
	Sasaran Strategis 9 (SS9): Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi
	Sasaran Strategis 10 (SS10): Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Sasaran Strategis 11 (SS11): Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	1. Nilai SMART 2. Nilai IKPA
Anggaran (Keuangan)		

Salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah ***Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM*** (Sasaran Strategis 7, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka BPSDM Hukum dan HAM menetapkan tujuan strategisnya yaitu ***Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University.***

Sasaran BPSDM Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran.

Sasaran strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam empat perspektif tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola)4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompentensi tinggi dan terkreditasi2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran3. Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Hukum dan HAM, maka sasaran strategis yang ditetapkan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM ialah :

Tabel 4. Sasaran Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan

Perspektif	Sasaran Strategis
Proses Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola)4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompentensi tinggi dan terkareditasi2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran3. Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah dokumen berisikan penugasan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut Perjanjian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 (dokumen legal Perjanjian Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat di lampiran).

Tabel 5. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Masyarakat	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Masyarakat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
1.	Meningkatkan kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%
		3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah	92%

No	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
1.	Penyelenggaraan diklat aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus mengikuti pelatihan di wilayah	94%
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	6
		2. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	354
		3. Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	402
		4. Luas pembangunan/renovasi gedung	100
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2



		3. Nilai SMART	95
		4. Jumlah laporan capaian kinerja	2
4.	Layanan Perkantoran	1. Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan	95%
		2. Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	80%

No	Kegiatan	Anggaran
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp 14.287.752.000
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 3.430.402.000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp 5.165.076.000
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp 5.198.256.000
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 494.018.000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada Semester I Tahun 2023, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan baik secara luring maupun daring. Selain itu demi mewujudkan Kemenkumham Corporate University, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah juga menyelenggarakan pembelajaran yang semakin menarik.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan **sasaran kegiatan** Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu “*Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah*” dengan **indikator kinerja kegiatan** “Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah” dengan **target** sebesar 92%.

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melakukan evaluasi penyelenggaraan pada setiap pelatihan. Pengukuran kinerja kualitas penyelenggaraan pelatihan tersebut dilakukan melalui pengisian form yang berisi pertanyaan seputar penyelenggaraan diklat.

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng Semester I 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	DASAR PENGHITUNGAN
Terselenggaranya Pelatihan di wilayah	Persentase penyelenggaraan pelatihan di wilayah	92%	94,01%	Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Tabel 7. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Semester I Tahun 2023

No	Nama Pelatihan	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
1	Pelatihan Protokoler	98,09
2	Webinar Antisipasi dan Penanggulangan Penyebaran Narkotika pada Lapas dan Rutan	96,60
3	Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	93,28
4	Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Keimigrasian	93,97
5	Webinar Workplace Learning (WPL) sebagai Akselerasi Pengembangan Kompetensi dalam Pembelajaran Corpu	93,32
6	Pelatihan Barang dan Jasa Metode Blended Learning	92,58
7	Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan Metode PJJ	89,84
8	Webinar Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN	94,84
9	Pelatihan Teknis Status Keimigrasian	94,24
10	Webinar Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN	93,08
11	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	93,20
12	Webinar Back To Basic Pemasarakatan	94,29
13	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas	94,07
14	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	94,72
	Jumlah	1.316,12

Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Semester I Tahun 2023:

$\frac{\text{Jumlah nilai evaluasi penyelenggaraan pelatihan}}{\text{Jumlah pelatihan}} \times \%$

Jumlah pelatihan

$$\frac{1.316,12}{14} \times \% = \mathbf{94,01 \%}$$

14

Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target	Capaian
Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	%	92	94,01

Capaian Kinerja Organisasi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$
$$\frac{94,01}{92} \times 100 \% = \mathbf{102,18 \%}$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 8. Capaian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Indikator Kinerja	2022		Semester I 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indikator Kinerja Kegiatan				
Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	90%	95%	92%	94,01%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa :

Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah mencapai 95% dari target 90%. Sedangkan pada Semester I Tahun 2023 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mencapai realisasi 94,01% dari target 92%. Hasil tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah baik di Tahun 2022 maupun Semester I Tahun 2023.

2) Capaian output kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023

Tabel 9. Capaian Output Kinerja

Program	Kegiatan	Capaian Output	Kelulusan	
			Lulus	Gagal
Pelatihan Teknis dan Fungsional	Pelatihan Protokoler	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Keimigrasian	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Barang dan Jasa Metode Blended Learning	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode MOOC	1.289 orang	1.289 orang	-
	Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan Metode PJJ	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Teknis Status Keimigrasian	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	40 orang	40 orang	-
	Jumlah	1.649 orang	1.649 orang	-
Kemenkumham Corporate University	Webinar Antisipasi dan Penanggulangan Penyebaran Narkotika pada Lapas dan Rutan	2.065 orang	2.065 orang	-
	Sosialisasi UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	160 orang	160 orang	-
	Webinar Workplace Learning (WPL) sebagai Akselerasi Pengembangan Kompetensi dalam Pembelajaran Corpu	476 orang	476 orang	-
	Webinar Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN	320 orang	320 orang	-
	Webinar Kreativitas dan Perlindungan Karya Tulis dalam Era Digital	416 orang	416 orang	-
	Webinar Back To Basic Pemasarakatan	2.968 orang	2.968 orang	-



	Launching MOOC Protokoler	617 orang	617 orang	-
	Jumlah	7.022 orang	7.022 orang	-
	Total	8.671 orang	8.671 orang	-

3) Analisa Capaian Indikator Kinerja

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target tersebut antara lain :

- Pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja mereka;
- Dalam mendukung Kemenkumham *Corporate University* Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan berbasis online seperti webinar dan sosialisasi yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan pencapaian output peserta jauh melebihi target yang telah ditetapkan;
- Para Widyaiswara yang dihadirkan baik secara klasikal maupun daring merupakan pegajar yang kompeten dan ahli di bidangnya;
- Para panitia penyelenggara juga aktif dalam memberikan informasi dan pendampingan selama pelatihan berlangsung;
- Hasil pelatihan yang diterima oleh para peserta sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dirasakan oleh para pejabat pengawas yang di satuan kerja peserta yang juga menjadi responden evaluasi.

4) Analisa Efisiensi

a. Analisa Efisiensi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi anggaran. Dengan cara tersebut, didapatkan angka Efisiensi Sebesar 20% dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Dengan asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah maksimal atau sangat baik.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapatkan nilai angka efisien sebesar 20 (dua puluh). Penghitungan angka tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 / PMK.02/20 17 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi meliputi:

- data capaian keluaran (CK) program / kegiatan;
- data target volume keluaran (TVK) program/kegiatan;
- pagu anggaran; dan
- realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran Rumus untuk pengukuran efisiensi sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK \times CK) - RAK}{\sum_{i=1}^n PAK \times CK} \times 100\%$$

Tabel 10. Capaian Kinerja Program Kegiatan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

No	Nama Kegiatan	PAK	RAK	Total TVK	Total CK
1.	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	4.346.132.000	2.325.607.235	5	5
2.	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	5.464.638.000	588.130.839	127	115
3.	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	4.099.080.000	1.473.099.708	3.000	8.671
4.	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	377.902.000	93.623.728	5	5



Rumus Perhitungan :

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK \times CK) - RAK}{\sum_{i=1}^n PAK \times CK} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \frac{((PAK1 \times CK1) - RAK1) + ((PAK2 \times CK1) - RAK2) + ((PAK2 \times CK1) - RAK2) + ((PAK3 \times CK3) - RAK3) + ((PAK4 \times CK4) - RAK4) + ((PAK5 \times CK5) - RAK5) + ((PAK6 \times CK6) - RAK6)}{(PAK1 \times CK1) + (PAK2 \times CK1) + (PAK3 \times CK3) + (PAK4 \times CK4) + (PAK5 \times CK5) + (PAK6 \times CK6)} \times 100\%$$

Efisiensi Anggaran Badiklat Kumham Jateng =

$$\frac{((4.346.132.000 \times 5) - 2.325.607.235) + ((5.464.638.000 \times 115) - 588.130.839) + ((4.099.080.000 \times 8.671) - 1.473.099.708) + ((377.902.000 \times 5) - 93.623.728)}{(4.346.132.000 \times 5) + (5.464.638.000 \times 115) + (4.099.080.000 \times 8.671) + (377.902.000 \times 5)} \times 100\%$$

Efisiensi Anggaran Badiklat Kumham Jateng =

$$\frac{19.405.052.765 + 627.845.239.161 + 35.541.649.580.292 + 1.795.886.272}{21.730.660.000 + 628.433.370.000 + 35.543.122.680.000 + 1.889.510.000} \times 100\%$$

Efisiensi Anggaran Badiklat Kumham Jateng =

$$\frac{36.190.695.758.490}{36.195.176.220.000} \times 100\% = 99\%$$

Dari hasil penghitungan di atas, diperoleh nilai efisiensi kinerja anggaran sebesar 99%. Meskipun dari hasil penghitungan tersebut, nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 99%, tetapi secara sistem pada aplikasi SMART DJA nilai efisiensi yang ditampilkan hanya sampai 20% untuk nilai maksimal dan -20% untuk nilai minimal.

b. Analisa Atas Efisiensi Sumber Daya

Penggunaan Sumber daya yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sudah dilakukan semaksimal mungkin baik dari sisi SDM maupun dari sisi anggaran dan sarana prasarana.

Pada tahun 2023 total seluruh SDM di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah berjumlah 50 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 19 orang dan tenaga PPNPN berjumlah 29 orang. Jumlah ASN ini tentunya terbilang sedikit untuk melaksanakan dan mencapai target Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dengan segala keterbatasannya Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai tupoksi semaksimal mungkin yang didukung dengan sarana dan prasarana yang ada.

Dalam hal penggunaan anggaran, porsi Belanja Modal untuk pencapaian target kinerja adalah sebesar 37,86%, porsi Belanja Barang sebesar 51,87%, dan porsi Belanja Pegawai sebesar 10,27% dari total anggaran yang diberikan. Total anggaran sebesar Rp 14.287.752.000,00 belanja modal sebesar Rp 5.409.638.000,00 dan diluar itu untuk belanja pegawai sebesar Rp 1.467.755.000,00 dan belanja barang sebesar Rp 7.410.359.000,00. Penggunaan anggaran sudah dilaksanakan dengan total penyerapan di Semester I Tahun 2023 sebesar Rp 4.480.461.436,00 (31,36%).

5) Realisasi Kinerja sesuai Target Jangka Menengah Rencana Strategis

Arah kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam lima tahun mendatang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran RPJMN 2020-2024 tersebut dijabarkan menjadi tujuh agenda pembangunan, di mana salah satunya menyebutkan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 70 menyatakan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dimaksud dapat berupa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), seminar, kursus, penataran Bimbingan Teknis (Bimtek) dan praktik kerja di instansi lain serta pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama satu tahun.

Selain itu Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 203 ayat (1), (3), (4), dan (4a) juga disebutkan:

1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
2. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikuti sertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan;

3. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
4. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university).

Berikut perbandingan capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 dalam upaya memenuhi target jangka menengah dalam dokumen renstra:

Tabel 11. Perbandingan capaian kinerja Semester I Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran kegiatan	Lokasi	Target				Capaian Semester I 2023
			2021	2022	2023	2024	
5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah		Daerah					
SK 6	Presentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah		85%	90%	92%	92%	94,01%

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki target jangka menengah dalam dokumen Renstra pada Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah dengan Presentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah di tahun 2021 sebesar 85%, tahun 2022 sebesar 90%, tahun 2023 sebesar 92% dan tahun 2024 sebesar 92%. Pada Semester I Tahun 2023 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memperoleh capaian kinerja sebesar 94,01%, sehingga telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

6) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah didukung dengan program/kegiatan penunjang, di antaranya:

a. *Badiklat Learning Center (BLC)*

Merupakan portal pembelajaran mandiri milik Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui alamat <https://lcb-jateng.kemenkumham.go.id> BLC menggunakan system pembelajaran dengan system timer yang dapat dikonversi menjadi jam pelajaran untuk memenuhi kewajiban 20 JP per tahun untuk tiap individu. Aplikasi ini dapat menjadi alternatif bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang ingin tetap meningkatkan kompetensi saat melaksanakan pekerjaan dari rumah (*work from home*). BLC Gen-2 telah dikembangkan dilengkapi dengan Buku Panduan User dan penambahan Fitur Registrasi Online, Standar Kompetensi Jabatan, dan Fitur Chat Help Desk.

Tersedianya aplikasi pembelajaran self development, registrasi peserta pelatihan dapat dilakukan secara online, dan belajar bisa dimanapun dan kapanpun. BLC mampu menjadi sebuah aplikasi yang memenuhi jawaban kebutuhan pengguna layanan akan tuntutan 20 JP/tahun bagi ASN. Selain itu juga menjadi jawaban atas isu keterbatasan pembelajaran/pelatihan pada masa pandemi covid-19 dan sebagai wujud implementasi Kemenkumham Corpu dan *e-government*.

b. *Sistem Informasi Pelatihan Badiklat Jateng (SILABA)*

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki inovasi Sistem Informasi Pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah (SILABA) yang merupakan sebuah framework yang dibangun untuk memudahkan Satuan Kerja di wilayah kerja dalam menyampaikan kebutuhan pelatihan bagi para pegawai. SILABA diluncurkan pada Tahun 2021.

SILABA menjadi sebuah aplikasi yang mampu secara efektif dan efisien menjawab permasalahan terkait Analisa Kebutuhan Pelatihan di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang selama ini belum

memenuhi pelatihan sesuai dengan kebutuhan. SILABA juga menjadi sebuah implementasi dari *e-government*.

c. ITU (Informasi Tata Usaha)

Merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah yang menyediakan informasi tata usaha meliputi keuangan dan BMN, Kepegawaian, dan Umum. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh informasi ketatausahaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

d. JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional)

Merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

7) Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dipengaruhi oleh:

- Pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja mereka;
- Dalam mendukung Kemenkumham *Corporate University* Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan berbasis online seperti webinar dan sosialisasi yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan pencapaian output peserta jauh melebihi target yang telah ditetapkan;
- Para Widyaiswara yang dihadirkan baik secara klasikal maupun daring merupakan pegajar yang kompeten dan ahli di bidangnya;
- Para panitia penyelenggara juga aktif dalam memberikan informasi dan pendampingan selama pelatihan berlangsung;
- Hasil pelatihan yang diterima oleh para peserta sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dirasakan oleh para pejabat pengawas yang di satuan kerja peserta yang juga menjadi responden evaluasi.

8) Analisis Kendala atau Hambatan

Kendala yang dihadapi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Kebijakan *Automatic Adjustment I* pada saat setelah ditetapkannya DIPA Tahun 2023 sebesar Rp. 400.000.000,00 (2,8% jumlah DIPA) mengharuskan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian metode pelatihan, dan penyesuaian kembali anggaran agar dapat dioptimalisasikan.
- b. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung Sarana Olahraga Outdoor, Rumah Negara Dan Kolam Retensi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sampai dengan Semester I TA.2023 belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pembatalan tender pemilihan penyedia jasa konstruksi dimaksud yang semula dijadwalkan akan selesai pada bulan Mei 2023. Pembatalan tersebut dikarenakan seluruh peserta tidak memenuhi kualifikasi pengadaan yang dipersyaratkan. Hal itu mengakibatkan perubahan rencana penyerapan anggaran yang seharusnya sudah terserap di Semester I TA 2023.
- c. Pelatihan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pelatihan dengan metode non klasikal atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sarana yang paling diperlukan adalah koneksi internet yang stabil. Hal-hal yang kami temui dikeluhkan oleh peserta adalah koneksi yang buruk atau tidak stabil sehingga peserta keluar dari aplikasi Zoom Meeting saat koneksi terputus. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi peserta dalam mengikuti pelatihan.
- d. Pembelajaran jarak jauh selama materi berlangsung belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat peserta yang mendapat tugas atau panggilan dari pimpinan satuan kerja, sementara peserta seharusnya sedang mengikuti diklat meskipun telah dicantumkan dalam Surat Pemanggilan agar dibebastugaskan dari tugas sehari-hari.
- e. Pada metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) panitia penyelenggara mengalami kesulitan dalam pengawasan terhadap kedisiplinan peserta untuk mengikuti kelas.
- f. Untuk hambatan dan permasalahan sampai saat ini yaitu keterlambatan pelaksanaan kegiatan belanja modal pembangunan baru bangunan Gedung rumah dinas, dikarenakan proses lelang yang belum selesai.

9) Upaya Perbaikan kedepan

Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah:

- a. Menyusun dan merencanakan anggaran dengan lebih baik lagi serta mengantisipasi adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang akan dilakukan ditahun berikutnya. Perencanaan yang dilakukan mengacu pada kebutuhan satuan kerja dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
- b. Membuat kalender kerja kegiatan dan rencana penarikan dana dengan menyusun strategi dan mempertimbangan kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dilakukan ketika tahun berjalan.
- c. Mendorong target serapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Perlu menegaskan kembali bahwa pelatihan yang dilakukan secara daring (PJJ) sama pentingnya dengan pelatihan klasikal, yang berbeda adalah metode pelaksanaannya sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut. Perlunya menyiapkan koneksi internet yang baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- e. Perlu menegaskan juga bahwa pelaksanaan pelatihan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh diperlukan dukungan dari satuan kerja agar peserta dapat mengikuti pembelajaran tanpa mendapat tugas atau panggilan dari pimpinan satuan kerja, karena telah dicantumkan dalam Surat Pemanggilan agar dibebastugaskan dari tugas sehari-hari.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada Semester I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2023

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH				
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi Semester I 2023 (Rp)	Capaian Realisasi
5249	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>			
5249.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	4.346.132.000	2.325.607.235	53,50 %
5249.EBB	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	5.464.638.000	588.130.839	10,76 %
5249.EBC	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	4.099.080.000	1.473.099.708	35,94 %
5249.EBD	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	377.902.000	93.623.728	24,77 %
	Jumlah	14.287.752.000	4.480.461.436	31,36 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 14.287.752.000,00. Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I telah menyerap anggaran senilai Rp 4.480.461.436,00 atau sebesar 31,36% dari total anggaran.



Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian kinerja keuangan TA 2022 dengan Semester I Tahun 2023.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	2022			Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	2023		
	Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Penyerapan Semester I 2023 (Rp)	Capaian (%)
<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>				<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</i>			
<i>Layanan Perkantoran</i>	4.096.581.000	4.026.630.665	98,29	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	4.346.132.000	2.325.607.235	53,50
<i>Layanan Perencanaan dan penganggaran Internal</i>	8.675.926.000	8.673.712.258	99,97	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	5.464.638.000	588.130.839	10,76
<i>Layanan Umum</i>	8.025.766.000	7.630.258.106	95,07	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	4.099.080.000	1.473.099.708	35,94
<i>Layanan Sarana Internal</i>	201.655.000	175.818.450	87,19	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	377.902.000	93.623.728	24,77
Jumlah	20.999.928.000	20.506.419.479	97,65	Jumlah	14.287.752.000	4.480.461.436	31,36

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun Anggaran 2022, capaian penyerapan anggaran adalah sebesar Rp Rp 20.506.419.479,00 dari pagu anggaran Rp 20.999.928.000,00 dengan persentase 97,65%. Sementara pada Semester I Tahun 2023 capaian penyerapan anggaran sebesar Rp 4.480.461.436,00 dari pagu anggaran Rp 14.287.752.000,00 dengan persentase 31,36%.
2. Pada Tahun 2023, pagu anggaran yang paling besar terdapat pada Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan nilai Rp 4.346.132.000,00. Sementara pagu anggaran yang paling kecil terdapat pada Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal dengan nilai Rp 377.902.000,00.
3. Pada Semester I Tahun 2023 realisasi terbesar terdapat pada Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 2.325.607.235 atau 53,50% dari pagu Rp 4.346.132.000 dan realisasi terkecil terdapat pada Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp 588.130.839 atau 10,76% dari pagu Rp 5.464.638.000. Rendahnya realisasi ini dikarenakan penyerapan anggaran pada pembangunan lanjutan gedung sarana olahraga, rumah dinas dan kolam retensi tidak maksimal akibat adanya pembatalan tender pemilihan penyedia jasa konstruksi dimaksud yang semula dijadwalkan akan selesai pada bulan Mei 2023.

Pembangunan Lanjutan Sarana Olahraga, Rumah Dinas dan Kolam Retensi

Pembangunan Lanjutan Sarana Olahraga, Rumah Dinas dan Kolam Retensi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023 sedang dalam tahap Perencanaan.

Berikut rincian pagu dan penyerapan anggaran pembangunan lanjutan sarana olahraga, rumah dinas dan kolam retensi :

Tabel 14. Anggaran Pembangunan Lanjutan Sarana Olahraga, Rumah Dinas dan Kolam Retensi

Keterangan	Pagu	Realisasi (s.d. Juni 2023)	%
Pembangunan Lanjutan Sarana Olahraga, Rumah Dinas dan Kolam Retensi	Rp 5.000.000.000	Rp 290.044.494	5,80
- Biaya Konstruksi Fisik	Rp 4.374.425.000	Rp -	-
- Biaya Perencanaan	Rp 346.035.000	Rp 288.744.494	83,44
- Biaya Pengawasan	Rp 196.422.000	Rp -	-
- Biaya Pengelolaan Kegiatan	Rp 83.118.000	Rp 1.300.000	1,56

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, penyerapan anggaran atas pembangunan lanjutan sarana olahraga, rumah dinas dan kolam retensi sebesar Rp 290.044.494 dari pagu Rp 5.000.000.000 atau sebesar 5,80%. Capaian ini kurang maksimal dikarenakan belanja modal Pengadaan Konstruksi Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung Sarana Olahraga Outdoor, Rumah Negara dan Kolam Retensi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sampai dengan Semester I TA 2023 belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pembatalan tender pemilihan penyedia jasa konstruksi dimaksud yang semula dijadwalkan akan selesai pada bulan Mei 2023. Pembatalan tersebut dikarenakan seluruh peserta tidak memenuhi kualifikasi pengadaan yang dipersyaratkan. Hal itu mengakibatkan perubahan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi Per Jenis Belanja

Tabel 15. Realisasi Per Jenis Belanja

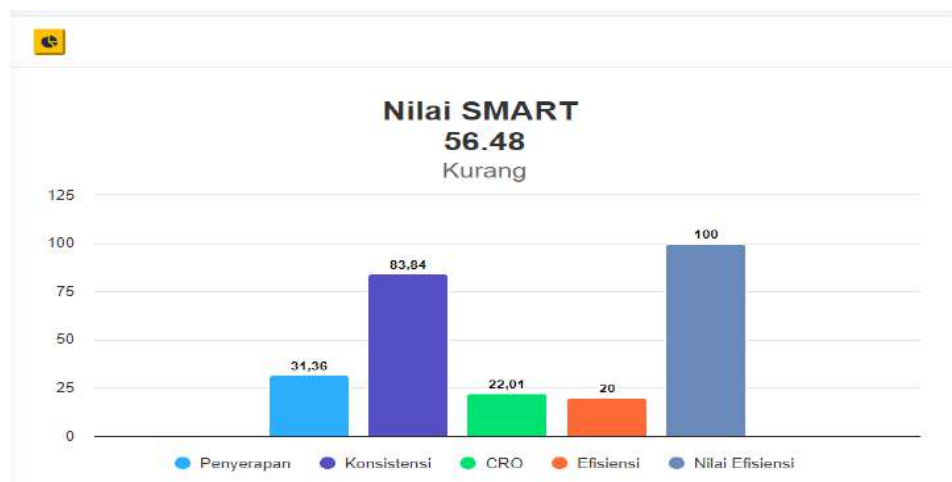
Jenis Belanja	Pagu		Realisasi		Persentase	
	2022	2023	2022	Semester I 2023	2022	Semester I 2023
Belanja Pegawai	1.191.626.000	1.467.755.000	1.183.623.358	750.076.124	99,33%	51,10%
Belanja Barang	11.162.376.000	7.410.359.000	10.679.083.863	3.207.296.823	95,67%	43,28%
Belanja Modal	8.645.926.000	5.409.638.000	8.643.712.258	523.088.489	99,97%	9,67%
Total	20.999.928.000	14.287.752.000	20.506.419.473	4.480.461.436	97,65%	31,36%

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Berikut nilai capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Aplikasi SMART DJA:

Grafik 3. Nilai SMARTDJA



Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memperoleh nilai 56,94. Masing-masing nilai Sub Komponen yaitu:

- a. Penyerapan sebesar 31.36
- b. Konsistensi sebesar 83.84
- c. CRO (capaian keluaran) sebesar 22,01
- d. Efisiensi sebesar 20
- e. Nilai Efisiensi sebesar 100

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memperoleh nilai IKPA per Juni 2023 sebesar 92,76 dengan nilai Sub Komponen sebagai berikut:

Gambar 2. Nilai IKPA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	026	013	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	65.95	84.99	98.50	100.00	93.13	100.00	100.00	92.76	100%	92.76
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.60	17.00	9.85	10.00	9.31	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.98		95.32					100.00			

- a. Revisi DIPA dengan nilai 100
- b. Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 65,95
- c. Penyerapan Anggaran dengan nilai 84,99

- d. Belanja Kontraktual dengan nilai 98,50
- e. Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100
- f. Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 93,13
- g. Dispensasi SPM dengan nilai 100
- h. Capaian output dengan nilai 100

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada E-performance adalah sebagai berikut:

Gambar 3. E-Performance

The screenshot displays the E-Performance system interface for the year 2023. The main heading is "PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 BADIKLAT JAWA TENGAH". The interface includes a search bar for "UNIT KERJA" (Unit Kerja) set to "BADIKLAT JAWA TENGAH" and a "Tampilkan" (Show) button. Below this is a table with columns for "NO", "SISWA", "STATUS", "INDIKATOR KINERJA", "KATEGORI", "MELAKUKAN", "MUTU PENYELESAIAN", "JENJANG", "SISTEM", "JAWABAN", and "NILAI". The table lists several performance indicators, including "Pembinaan Kurikulum Pembelajaran" and "Sarana Fisika Regenerasi". The "NILAI" column shows scores of 100, 100, and 100 for the listed indicators. The interface also includes a "Urutkan No" (Sort by No) button and a footer with the text "© BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN 2023".

2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Capaian kinerja Balai

Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sesuai dengan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM telah tercapai. Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki target sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah adalah sebesar 92% dan pada Semester I telah mencapai 94,01% dengan capaian output peserta sebanyak 8.671 orang. Berikut adalah capaian kinerja Semester I 2023:

Tabel 16. Capaian Kinerja Semester I Tahun 2023

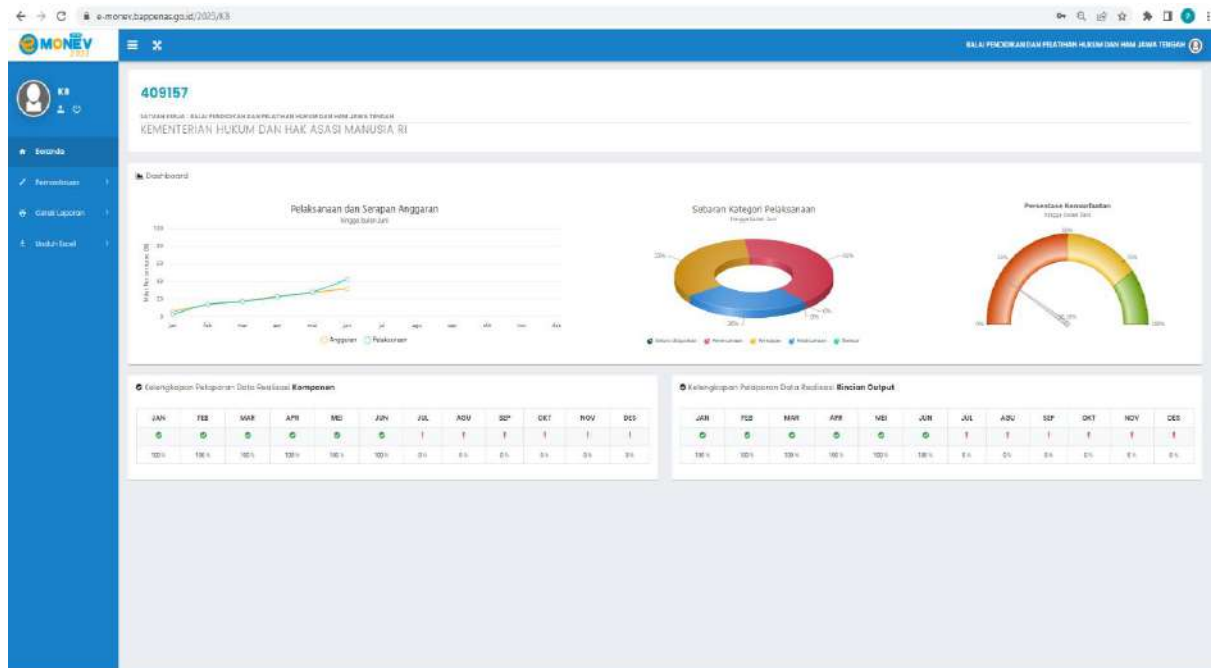
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran kegiatan	Target				Capaian Sem I 2022
		2021	2022	2023	2024	
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah					
SK 6	Presentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	85%	90%	92%	92%	94,01%

3) e-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-monev Bappenas juga digunakan untuk pemantauan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga).

Capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Aplikasi e-Monev Bappenas adalah sebagai berikut:

Gambar 4. e-monev Bappenas



4) Capaian / Prestasi / Inovasi Unggulan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2023

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah meraih beberapa capaian / prestasi / Inovasi Unggulan diantaranya:

- Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit/satuan kerja yang dinyatakan oleh Tim Penilai Nasional bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah lulus tanpa catatan dalam seleksi administrasi nasional. Selanjutnya akan mengikuti tahapan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memperoleh predikat nilai A dalam Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Dalam implementasi *Corporate University* Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mengaktifkan kembali program *Podcast Series/Microlearning* dengan berbagai macam tema yang terkini sebagai variasi model pengembangan untuk mempercepat pemerataan konektivitas pengembangan kompetensi di wilayah dengan sarana prasarana podcast yang telah sangat memadai.
- Pencapaian target sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan di wilayah dengan target indikator persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah sebesar 92%, pada Semester I TA.2023 telah dicapai persentase penilaian sebesar 94,01%.
- Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kompetensi strategis SDM di Bidang Hukum dan HAM dengan indikator Kinerja sasaran persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan langkah-langkah keterukuran peningkatan kinerja alumni dengan tindak lanjut *action plan* alumni yang akan dievaluasi dalam Evaluasi Pasca Pelatihan yang dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan pelatihan.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian output Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 pada Pelatihan Teknis dan Fungsional sebanyak 1.649 orang dan kegiatan Kemenkumham *Corporate University* meliputi kegiatan webinar, sosialisasi, dan *launching* MOOC Protokoler mencapai output 7.022 orang. Sehingga total capaian output Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 menjadi 8.671 orang.
2. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu “Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah”, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah memperoleh capaian output yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target	Capaian
Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	%	90	94,01

3. Kendala yang dihadapi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan pada Semester I Tahun 2023 antara lain :
 - a. Kebijakan *Automatic Adjustment I* pada saat setelah ditetapkannya DIPA Tahun 2023 sebesar Rp. 400.000.000,00 (2,8% jumlah DIPA) mengharuskan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian metode pelatihan, dan penyesuaian kembali anggaran agar dapat dioptimalisasikan.
 - b. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung Sarana Olahraga Outdoor, Rumah Negara Dan Kolam Retensi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sampai dengan Semester I TA.2023 belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pembatalan tender pemilihan penyedia jasa konstruksi dimaksud yang semula dijadwalkan akan selesai pada bulan Mei 2023. Pembatalan tersebut dikarenakan seluruh peserta tidak memenuhi kualifikasi pengadaan yang dipersyaratkan. Hal itu mengakibatkan perubahan rencana penyerapan anggaran yang seharusnya sudah terserap di Semester I TA 2023.

- c. Pelatihan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pelatihan dengan metode non klasikal atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sarana yang paling diperlukan adalah koneksi internet yang stabil. Hal-hal yang kami temui dikeluhkan oleh peserta adalah koneksi yang buruk atau tidak stabil sehingga peserta keluar dari aplikasi Zoom Meeting saat koneksi terputus. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi peserta dalam mengikuti pelatihan.
- d. Pembelajaran jarak jauh selama materi berlangsung belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat peserta yang mendapat tugas atau panggilan dari pimpinan satuan kerja, sementara peserta seharusnya sedang mengikuti diklat meskipun telah dicantumkan dalam Surat Pemanggilan agar dibebastugaskan dari tugas sehari-hari.
- e. Pada metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) panitia penyelenggara mengalami kesulitan dalam pengawasan terhadap kedisiplinan peserta untuk mengikuti kelas.
- f. Untuk hambatan dan permasalahan sampai saat ini yaitu keterlambatan pelaksanaan kegiatan belanja modal pembangunan baru bangunan Gedung rumah dinas, dikarenakan proses lelang yang belum selesai.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut maka perlu adanya tindak lanjut terhadap hambatan/permasalahan yang ada, yaitu:

- a. Menyusun dan merencanakan anggaran dengan lebih baik lagi serta mengantisipasi adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang akan dilakukan ditahun berikutnya. Perencanaan yang dilakukan mengacu pada kebutuhan satuan kerja dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
- b. Membuat kalender kerja kegiatan dan rencana penarikan dana dengan menyusun strategi dan mempertimbangan kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dilakukan ketika tahun berjalan.
- c. Mendorong target serapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Perlu menegaskan kembali bahwa pelatihan yang dilakukan secara daring (PJJ) sama pentingnya dengan pelatihan klasikal, yang berbeda adalah metode pelaksanaannya sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut. Perlunya menyiapkan koneksi internet yang baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar.



- e. Perlu menegaskan juga bahwa pelaksanaan pelatihan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh diperlukan dukungan dari satuan kerja agar peserta dapat mengikuti pembelajaran tanpa mendapat tugas atau panggilan dari pimpinan satuan kerja, karena telah dicantumkan dalam Surat Pemanggilan agar dibebastugaskan dari tugas sehari-hari.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaswo
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asep Kurnia
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Desember 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM


Asep Kurnia
NIP. 196611191986031001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah


Kaswo
NIP. 197404261999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	80% 95%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna 2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi 3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90% 93% 93%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	92%

No.	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	94%

No.	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	6
		2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	354
		3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	402
		4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung	100
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2
		3. Nilai SMART	95
		4. Jumlah laporan capaian kinerja	2
4.	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
		2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah		Rp. 14.287.752.000,-
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3.430.402.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 5.165.076.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 5.198.256.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 494.018.000,-

Semarang, 30 Desember 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM

Asep Kurnia
NIP. 196611191986031001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah

Kaswo
NIP. 197404261999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaswo
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 30 Desember 2022

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah


Kaswo
NIP. 197404261999031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 - Faksimili: (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id E-mail: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W13.PL.04.01-176 3 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Informasi Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Yth.

1. KEPALA BADIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
2. KEPALA LAPAS KELAS IIB BREBES
3. KEPALA LPKA KELAS I KUTOARJO
4. KEPALA BAPAS KELAS II MAGELANG
5. KEPALA BAPAS KELAS II PATI
6. KEPALA KANIM KELAS I TPI SURAKARTA
7. KEPALA KANIM KELAS I TPI CILACAP
8. KEPALA KANIM KELAS I TPI SEMARANG
9. KEPALA KANIM KELAS I NON TPI PEMALANG
10. KEPALA KANIM KELAS II NON TPI WONOSOBO
11. KEPALA RUDENIM SEMARANG

di Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- g. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : W.13-88.PR.02.02 TAHUN 2023 Tentang Tim Penilaian Mandiri Sakip Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2022.

1

2. Berdasarkan rujukan tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan terhadap 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan rincian hasil evaluasi mandiri oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Jumlah	Predikat
1	Badiklat Hukum Dan Ham Jawa Tengah	25.9	25.7	13.5	20	85.1	A
2	Lapas Kelas IIB Brebes	25,9	25,7	13.5	20	85.1	A
3	LPKA kelas I Kutoarjo	25.9	25.7	12.9	20	84.5	A
4	Bapas Kelas II Magelang	25.9	25.7	13.5	20	85,1	A
5	Bapas Kelas II Pati	25.9	25.7	12.9	20	84.5	A
6	Kanim Kelas I TPI Surakarta	25.9	25.7	12.9	20	84.5	A
7	Kanim Kelas I TPI Cilacap	25.9	25.7	13.5	20	85.1	A
8	Kanim Kelas I TPI Semarang	25.9	25.7	12.9	20	84.5	A
9	Kanim Kelas I Non TPI Pemalang	25.9	25.7	12.9	20	84.5	A
10	Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo	25.9	25.7	13.5	20	85.1	A
11	Rudenim Semarang	25.9	25.7	13.5	20	85.1	A

3. Adapun rekomendasi hasil evaluasi internal terlampir dalam surat ini.
4. Demikian untuk untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh
HANTOR SITUMORANG
NIP. 196703171992031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B/06/PW.03/2023

TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, dengan ini Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak tanggal 1 s.d. 30 Juni 2023 berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Kementerian PANRB.
2. Hasil seleksi administrasi merujuk pada syarat pengusulan dan penetapan Zona Integritas sebagaimana tercantum pada:
 - a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; dan
 - c. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.
3. Hasil seleksi administrasi Zona Integritas dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. Unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus dan Tidak Lulus** sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** pengumuman ini.
 - b. Unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus Dengan Catatan** sebagaimana **Lampiran II**, **wajib** memenuhi tindak lanjut ketentuan pengumuman ini dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja atau selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2023 pukul 23.59 WIB.
4. Bukti tindak lanjut sebagaimana angka 3 huruf b disampaikan dalam bentuk *softcopy* pada laman <https://bit.ly/FormSanopahdanTindakLanjutZI2023>. TPN tidak menerima penyampaian melalui *hardcopy/hardfile*.
5. Keputusan TPN atas/unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus dan Tidak Lulus** bersifat final dan mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini dapat menghubungi Narahubung dalam **Lampiran III** pengumuman ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Juli 2023

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Lampiran I

Nomor : B/06/PW.03/2023

Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) Tahun 2023**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**1. UNIT KERJA YANG DINYATAKAN **LULUS** SELEKSI ADMINISTRASI

No	Instansi Pemerintah	Unit/Satuan Kerja yang Diusulkan	Usulan
Kementerian/Lembaga			
1	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja)	WBBM
2	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum)	WBBM
3	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	WBBM
4	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	WBBM
5	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	WBBM
6	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	WBBM
7	Tentara Nasional Indonesia	STHM Ditkumad	WBK
8	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	WBK
9	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pusat Jasa Kearsipan	WBK
10	Arsip Nasional Republik Indonesia	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	WBK
11	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	WBK
12	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	WBK
13	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Bioenergi	WBK
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Balai Konservasi Air Tanah	WBK

No	Instansi Pemerintah	Unit/Satuan Kerja yang Diusulkan	Usulan
15	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Survei Geologi	WBK
16	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Balai Diklat Tambang Bawah Tanah	WBK
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi	WBK
18	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan	WBBM
19	Badan Narkotika Nasional	BNNP Sumatera Selatan	WBK
20	Badan Narkotika Nasional	BNNP Kalimantan Tengah	WBK
21	Badan Narkotika Nasional	BNNK Tanjung Pinang	WBK
22	Badan Narkotika Nasional	BNNK Pematang Siantar	WBK
23	Badan Narkotika Nasional	BNNK Purbalingga	WBK
24	Badan Narkotika Nasional	BNNK Cilacap	WBK
25	Badan Narkotika Nasional	BNNK Mataram	WBK
26	Badan Narkotika Nasional	BNN Kota Banjarbaru	WBK
27	Badan Narkotika Nasional	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	WBK
28	Kementerian Hukum dan HAM	Badiklat Jawa Tengah	WBBM
29	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Balmon SFR Kelas I Semarang	WBK
30	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Balmon SFR Kelas I Jakarta	WBK
31	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Balmon SFR Kelas I Yogyakarta	WBK
32	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Museum Penerangan	WBK
33	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia	WBK
34	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, di Jakarta	WBBM
35	Kementerian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand	WBBM
36	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia	WBBM
37	Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Kota Banjar	WBBM